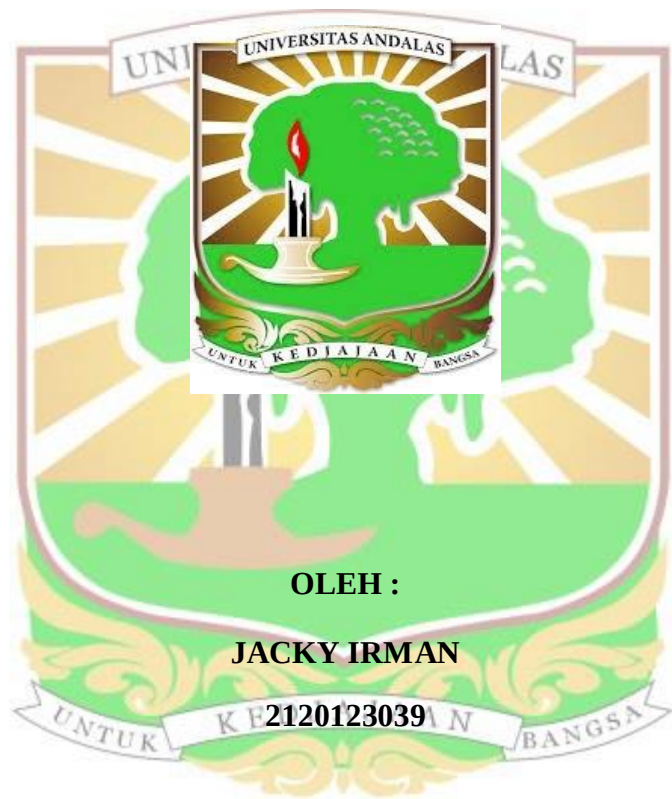


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK
ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI DI KOTA SUNGAI
PENUH**

*Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan*



**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT ATAS SERTIFIKAT YANG CACAT ADMINISTRASI DI KOTA SUNGAI PENUH

NAMA : JACKY IRMAN, SH

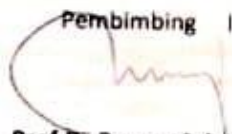
NIM : 2120123039

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan LULUS pada tanggal 21 Februari 2025.

Menyetujui

KOMISI PEMBIMBING

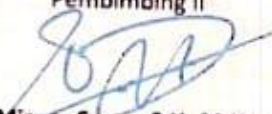
Pembimbing I



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H

NIP: 196911181994031002

Pembimbing II



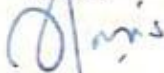
Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum

NIP: 197009021998032003

Menyetujui

KOMISI PENGUJI

Penguji



Dr. Khairani, S.H., M.H

NIP: 196212111989012001

Penguji



Dr. Muhammad Hesti, SH, M.H

NIP: 196311121990031003

Penguji

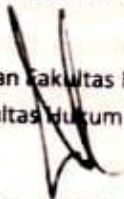


Dr. Yasniwati, M.H

NIP: 19740518199032001

Dekan Fakultas Hukum

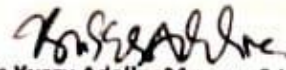
Fakultas Hukum Universitas Andalas



Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H

NIP: 196807231993021001

Ketua Program Study
Magister Kenotariatan



Dr. Yussy Adellina Mannas, S.H., M.H

NIP: 198402182008012002

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI DI KOTA SUNGAI PENUH

(JACKY IRMAN, NIM 2120123039, 101 halaman)

ABSTRAK

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. landasan dalam hukum agraria Indonesia sekaligus menjadi sumber hukum materiil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satu Permasalahan yang timbul adalah timbulnya sertipikat ganda pada satu bidang tanah akibat cacat administrasi sebagaimana yang Penulis temui dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Spn. Permasalahan yang dibahas yaitu (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 56/Pdt.G/2021/PN Spn ? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang cacat administrasi di Kota Sungai Penuh? dan (3) Bagaimana akibat hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang cacat administrasi dan pembatalan sertipikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di Kota Sungai Penuh? Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris disebut juga penelitian lapangan dengan memperoleh data secara langsung dilapangan melalui wawancara. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 56/Pdt.G/2021/PN Spn didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Perlindungan hukum kepada pemegang hak diwujudkan dengan diberikanya setipikat hak atas tanah. Dengan memiliki sertipikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subjek hak, dan objek haknya menjadi nyata, namun tidak terlepas juga dari permasalahan seperti adanya sertipikat hak atas tanah ganda dengan objek yang sama akibat adanya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah dan penerbitan sertipikat tanah tersebut. Akibat hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang cacat administrasi mengakibatkan sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, Badan Pertanahan Nasional merupakan badan yang berwenang mengeluarkan dan mencabut keberlakuan sebuah sertipikat kepemilikan atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sertipikat, Cacat Administrasi .

LEGAL PROTECTION FOR CERTIFICATE HOLDERS OF LAND RIGHTS WITH ADMINISTRATIVE DEFECTS IN THE SUNGAI PENUH CITY

(JACKY IRMAN, NIM 2120123039, 101 Pages)

ABSTRACT

Soil is a part of the earth called the earth's surface. Land is one of the objects regulated by agrarian law. foundation in Indonesian agrarian law as well as being a source of material law in the formation of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. One of the problems that arises is the emergence of double certificates on one plot of land due to administrative defects, as the author found in the Decision of the Sungai Banyak District Court Number 56/Pdt.G/2021/PN Spn. The issues discussed are (1) What are the judge's legal considerations in the decision in case number 56/Pdt.G/2021/PN Spn? (2) What is the legal protection for holders of land title certificates with administrative defects in Sungai Penuh City? and (3) What are the legal consequences for holders of certificates of land rights which have administrative defects and cancellation of certificates which do not have binding legal force in Sungai Penuh City? Writing this thesis uses empirical legal research, also known as field research, by obtaining data directly in the field through interviews. The judge's legal considerations in case number 56/Pdt.G/2021/PN Spn were based on the evidence presented by the parties at the trial, both written evidence and statements from witnesses. Legal protection for rights holders is realized by granting a certificate of land rights. By having a certificate, legal certainty regarding the type of land right, the subject of the right, and the object of the right becomes real, but it cannot be separated from problems such as the existence of multiple land right certificates with the same object due to parties committing unlawful acts in control. land and the issuance of land certificates. The legal consequences for holders of land title certificates whose administrative defects result in the certificate not having legal force as legal evidence of ownership, the National Land Agency is the body that has the authority to issue and revoke the validity of a land ownership certificate based on a court decision which has permanent legal force.

Keywords: Legal Protection, Certificate, Administrative Defects.

KATA PENGANTAR